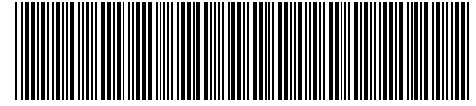




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408753/2021**



DS:8201-3767-0020-4729

**Revisi ke 01**

Tanggal : 25 Februari 2021

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (03)     | Ditjen Administrasi Hukum Umum   |
| 3. Provinsi                   | : (05)     | JAWA TIMUR   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408753) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 4.580.040.000 ( EMPAT MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH JUTA EMPAT PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	4.580.040.000
Rp.	4.580.040.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 4.580.040.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                     |           |               |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN SURABAYA II | (135) Rp. | 4.580.040.000 |
|---------------------|-----------|---------------|

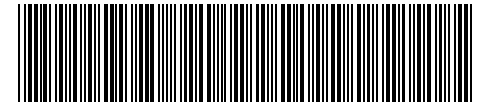
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8201-3767-0020-4729

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode>Nama Satker : (408753) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4.580.040.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			4.580.040.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase peningkatan PNBP Administasi Hukum Umum di wilayah			
		2. 01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
		3. 02	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5251.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.287.146.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi penyelesaian permasalahan kenotariatan pada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan di Wilayah	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.287.146.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5251.AEA	Koordinasi	23,00	kegiatan	681.892.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	23,00	kegiatan	681.892.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7,00	layanan	1.408.226.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	7,00	layanan	1.408.226.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	37.416.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan perkara pada kantor wilayah	1,00	Perkara	37.416.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	19,00	Lembaga	165.360.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	19,00	Lembaga	165.360.000

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

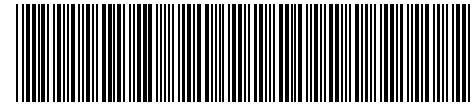
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2021**

**I B. SUMBER DANA**



DS:8201-3767-0020-4729

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
 Kode>Nama Satker : (408753) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	4.580.040.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	4.580.040.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8201-3767-0020-4729

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode>Nama Satker : (408753) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408753	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	-	4.580.040	-	-	-	4.580.040		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	4.580.040	-	-	-	4.580.040		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	4.580.040	-	-	-	4.580.040		
5251.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	2.287.146	-	-	-	2.287.146	05 . 51	
04	PNBP	-	2.287.146	-	-	-	2.287.146	135	
5251.AEA	Koordinasi (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	681.892	-	-	-	681.892	05 . 51	
04	PNBP	-	681.892	-	-	-	681.892	135	
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	1.408.226	-	-	-	1.408.226	05 . 51	
04	PNBP	-	1.408.226	-	-	-	1.408.226	135	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	37.416	-	-	-	37.416	05 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8201-3767-0020-4729

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode>Nama Satker : (408753) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	37.416	-	-	-	37.416	135	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	165.360	-	-	-	165.360	05 . 51	
04 PNBP		-	165.360	-	-	-	165.360	135	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>4.580.040</b>	-	-	-	<b>4.580.040</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8201-3767-0020-4729

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode>Nama Satker : (408753) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408753	<b>KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	10.000	412.064	703.142	857.366	163.390	545.308	381.968	488.786	187.850	469.654	360.512	4.580.040
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	10.000	412.064	703.142	857.366	163.390	545.308	381.968	488.786	187.850	469.654	360.512	4.580.040
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	10.000	412.064	703.142	857.366	163.390	545.308	381.968	488.786	187.850	469.654	360.512	4.580.040
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	10.000	412.064	703.142	857.366	163.390	545.308	381.968	488.786	187.850	469.654	360.512	4.580.040

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2021  
IV A. B L O K I R**



DS:8201-3767-0020-4729

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : [05] JAWA TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [408753] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

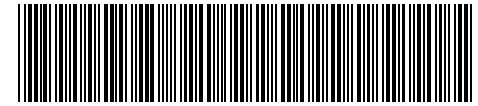
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2021  
IV B. C A T A T A N**



DS:8201-3767-0020-4729

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : [05] JAWA TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [408753] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001